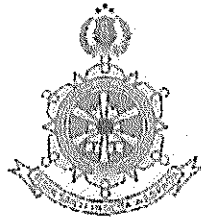


BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI  
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI



**MONITORING DAN EVALUASI**  
**KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK TRIWULAN II**

**1. DASAR HUKUM**

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No.16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara RI
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

**2. PELAKSANAAN**

Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Informasi Publik pada Triwulan II (April-Juni) 2017 perlu dilakukan guna memastikan bahwa pelayanan dari seluruh jajaran personil Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri kepada masyarakat bisa semakin baik. Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini dilakukan dalam beberapa tahap.

Pertama, monev terhadap website utama yang dimiliki oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi dengan alamat <http://tipidkorpolti.info> untuk mengetahui sejauhmana peran dari situs tersebut baik dalam memberikan informasi mulai dari Berita, Press release hingga Pengetahuan seputar kegiatan-kegiatan yang tengah dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi.

Kedua, Monev terhadap Aplikasi sistem pelaporan Korupsi yang beralamat di <http://laporan.tipidkorpolti.info/> dan *Whistle blower system* (WBS) yang beralamat di <http://zi.tipidkorpolti.info/wbs/>

Ketiga, Monev terhadap penyusunan survey tamu baik pada tamu Direktur, Staff, Dumas hingga tamu Lidik Sidik. Sistem yang akan digunakan ini terbagi menjadi 2 buah.

Yang pertama ialah sistem survey melalui kotak saran dimana tamu saat datang ke Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri akan diberikan sebuah koin. Koin ini pada akhir kunjungan akan dikembalikan kembali dan dimasukkan ke kotak saran.

Sedangkan untuk sistem yang kedua ialah sistem survey dengan data anonym. Survey ini diberikan pada akhir kunjungan tamu. Tamu akan dipersilahkan mengisi survey yang terdiri dari beberapa pertanyaan, dengan opsi pilihan berupa emoticon.

### **3. PERMASALAHAN**

Terhadap Monev situs Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri hingga saat ini sudah cukup memberikan kemajuan. Pada halaman-halaman yang kosong misalnya, sudah mulai terisi dengan konten dan data-data yang sesuai. Meski begitu, belum sepenuhnya halaman-halaman yang ada telah terisi,

sehingga masih diperlukan proses pelengkapan data untuk selanjutnya.

Sedangkan terhadap Aplikasi sistem pelaporan korupsi dan Sistem Whistle Blower System (WBS) yang merupakan bagian dari program Zona Integritas. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, masih belum dimanfaatkan oleh masyarakat. Meski demikian proses sosialisasi pada situs utama dan secara jajaran personil telah dilakukan.


Untuk layanan Survey kepada tamu yang direncanakan akan segera dilakukan masih terkendala beberapa hal. Seperti belum tersedianya monitor layar sentuh (Touchscreen) sebagai perangkat untuk mengisi survey, kartu nama pengunjung untuk identitas dan kotak saran.

#### **4. KESIMPULAN**

- Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Informasi Publik pada periode Triwulan ke II (April-Juni) 2017 telah berjalan sesuai dengan timeline rencana kerja pembangunan ZI yang telah ditetapkan.
- Terhadap berbagai permasalahan yang muncul telah coba untuk segera diselesaikan. Seperti halaman-halaman pada website yang masih ditemukan belum terisi datanya terus dicoba untuk dilengkapi.
- Sedangkan untuk permasalahan belum adanya laporan korupsi atau laporan WBS yang dibuat oleh masyarakat umum meski sudah dilakukan sosialisasi menunjukkan perlu adanya suatu tindakan yang lebih terbuka dan massif agar masyarakat luas bisa memanfaatkannya dengan baik.
- Penerapan sistem survey yang direncanakan akan segera diterapkan dan masih terkendala telah dicoba dicari cara penyelesaiannya.

## 5. PENUTUP

Demikian Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Informasi Publik pada periode Triwulan ke II ini dibuat, diharapkan dengan adanya Monev ini akan menghasilkan komponen hasil yang diharapkan yaitu Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri mampu melayani masyarakat dan menyediakan informasi terkait tindak pidana korupsi dengan lebih baik lagi.

 Juni 2017  
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI  
DIREKTUR  
Dr. AKHMAD WIYAGUS. M.Si., M.M  
BRIGADIR JENDERAL POLISI